

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam KUHP maupun di luar KUHP masih ditemukan berbagai pengaturan perbuatan pidana dengan ancaman pidana mati. Masih dicantumkannya pidana mati tersebut ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pengujian konstiusionalitas hukuman mati yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2007, MK memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan atas penerapan asas-asas penegakan hukum dan prinsip *due process of law* terhadap tersangka/terdakwa melalui sub-sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya persolan yang ditemukan dalam berbagai putusan pidana yang menjatuhkan pidana mati, persoalan-persoalan tersebut tampak menyeluruh dan berulang, seperti kehadiran akses bantuan hukum yang efektif, minimnya pembuktian dari jaksa, penyidikan yang eksekutif, sampai dengan inkonsistensi putusan hakim.
2. Secara formil proses perkara pidana ini telah melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berawal dari Yusman Telaumbanua tidak didampingi penasihat hukum atau didampingi secara memadai di setiap tingkat pemeriksaan walaupun di pengadilan Hakim menunjuk Penasihat Hukum untuk Yusman Telaumbanua. Pengadilan Negeri

Gunungsitoli tidak jeli dalam melihat proses peradilan, dimana terdapat pelanggaran serius terhadap hukum acara. Selain itu, Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memeriksa perkara pembunuhan berencana ini terlalu menyederhanakan masalah sehingga pertimbangan hukum yang diberikan kurang memadai dan tidak mendalam. Semestinya Pengadilan Negeri Gunungsitoli lebih melihat adanya unsur *mens rea* (niat jahat) dalam memutus kesalahan terdakwa. Akibat dari pelanggaran terhadap penerapan hukum materil dan formil, dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan pidana mati dan menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun terhadap Yusman Telaumbanua karena berdasarkan *novum* bahwa Yusman Telaumbanua masih di bawah umur dan/atau dalam kategori anak ketika turut serta melakukan perbuatan pidana pada tahun 2012. Oleh karenanya, Kecacatan dalam administrasi hukum berarti orang-orang yang terancam pidana mati disangkal hak mereka untuk proses hukum yang adil. Pelanggaran hak hukum seseorang sering dimulai dari saat penangkapan disusul penahanan sebelum sampai di pengadilan, bahkan berbulan-bulan tanpa pengawasan pihak pengadilan.

B. Saran

1. Mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembahasan terkait perubahan KUHAP untuk memberikan standar baru bagi proses peradilan pidana terhadap tersangka. Selanjutnya, terhadap institusi Kepolisian agar konsisten menerapkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi

Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga mencegah terjadinya praktik pelanggaran HAM. Setidaknya, meningkatkan akses bantuan hukum yang kompeten bagi tersangka/terdakwa, dan juga kemungkinan bagi mereka untuk melakukan banding atau prosedur lainnya. Khusus bagi yang kurang mampu secara ekonomi, memastikan tersedianya sumber daya bagi Organisasi Bantuan Hukum untuk melakukan penunjukan pengacara *pro bono* yang kompeten di seluruh wilayah Indonesia.

2. Keberadaan pengadilan dalam sebuah negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pencari keadilan (*justititabelend*) agar mendapatkan putusan yang adil dalam mempertahankan haknya. Terhadap kasus-kasus dengan ancaman pidana mati, Mahkamah Agung diharapkan dapat mengeluarkan surat edaran yang memperketat syarat penjatuhan pidana mati tanpa melanggar *due process of law* dan telah melaksanakan dan menerapkan ketentuan Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta memeriksa kasus secara komprehensif dan arif bijaksana sehingga memberikan keadilan yang hakiki.